



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 114/M.PPN/HK/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 24/M.PPN/HK/03/2022

TENTANG

PENETAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 24/M.PPN/HK/03/2022 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 24/M.PPN/HK/03/2022 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor ...

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 24/M.PPN/HK/03/2022 TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Mengubah Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disusun sebagai pedoman arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA ...

- KETIGA : Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat:
- a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

No	Project/Activities	UIC	Baseline		Target		Output
			2022	2023	2024		
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional							
Indikator	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional						
INISIATIF STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL							
1 Tata Kelola							
	- Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2024	Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>			
	- Persiapan Penyusunan RPJPN 2025-2045	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	- Persiapan Penyusunan RPJMN 2025-2029			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2 Manajemen							
	- Ekonomi Hijau dengan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim (PBI)	Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air		<input checked="" type="checkbox"/>			
	- Peta Jalan Transformasi Indonesia	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik		<input checked="" type="checkbox"/>			
3 Layanan							
	- Integrasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/ Non APBN dalam Major Project	Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>			
4 Aplikasi							
	- Penguatan Sinkronisasi Aplikasi Perencanaan (KRISNA) dengan Aplikasi Penganggaran (SAKTI)	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>			
	- Penyiapan KRISNA dan e-monev menjadi aplikasi umum dalam SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>			
5 Infrastruktur							
6 Keamanan							
7 Audit TIK							

No	Project/Activities	UIC	Baseline		Target		Output
			2022	2023	2024		
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional							
Indikator	Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional						
INISIATIF STRATEGIS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NASIONAL							
1 Tata Kelola							

		- Evaluasi pelaksanaan RKP 2022	Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>		
2 Manajemen							
3 Layanan							
4 Aplikasi							
		Rancangan Sinkronisasi Aplikasi e-monev Renja K/L dengan aplikasi SMART Kemenkeu	Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>		
		Monitoring dan pengendalian pencapaian sasaran/target RKP 2022 melalui e-monev			<input checked="" type="checkbox"/>		
5 Infrastruktur							
6 Keamanan							
7 Audit TIK							

No	Project/Activities	UIC	Baseline			Target			Output
			2022	2023	2024	2023	2024		
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner									
Indikator	Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L								
Indikator	Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L								
INISIATIF STRATEGIS ENABLER (PRAKARSA STRATEGIS)									
1 Tata Kelola									
		- Penyusunan Masterplan Food Estate	Direktorat Pangan dan Pertanian		<input checked="" type="checkbox"/>				
		- Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat		<input checked="" type="checkbox"/>				
		- Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana		<input checked="" type="checkbox"/>				
		- Pengembangan Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemeria (Cerdas, Mandiri, Sejahtera)	Direktorat Kependudukan & Jaminan Sosial		<input checked="" type="checkbox"/>				
2 Manajemen									
		- Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI)	Sekretariat SDI		<input checked="" type="checkbox"/>				
		- Penataan dan Penguatan Pendamping Pembangunan	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan		<input checked="" type="checkbox"/>				
		- Koordinasi Strategis Pengembangan Geopark	Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan		<input checked="" type="checkbox"/>				
3 Layanan									
		- Peningkatan Peran Serta/Kemitraan Non Pemerintah: Pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional		<input checked="" type="checkbox"/>				

		Peningkatan Peran Serta/Kemitraan Non-Pemerintah: Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)	Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air		<input checked="" type="checkbox"/>		
4 Aplikasi							
5 Infrastruktur							
6 Keamanan							
7 Audit TIK							

No	Project/Activities	UIC	Baseline			Target			Output	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien										
	Indikator	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional								
	Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi								
	Indikator	Indeks Penerapan SPBE								
INISIATIF STRATEGIS PENERAPAN SPBE										
1 Tata Kelola										
	A	Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian								
		-	Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi persiapan penyusunan proses bisnis Kementerian PPN/Bappenas 2023	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana		<input checked="" type="checkbox"/>				
		-	Pelaksanaan kegiatan workshop identifikasi dan tata cara penyusunan proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku			<input checked="" type="checkbox"/>				
		-	Penyusunan Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis dan Layanan			<input checked="" type="checkbox"/>				
		-	Penyusunan Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi & Aplikasi SPBE	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>				
		-	Penyusunan Arsitektur SPBE Domain Infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>				
		-	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana		<input checked="" type="checkbox"/>				
		-	Pelaksanaan inovasi proses bisnis	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana		<input checked="" type="checkbox"/>				
	B	Pembentukan dan penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kementerian								

		-	Merevisi SK Menteri Nomor 48 tahun 2022 tentang Tim Koordinasi SPBE	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana dan Pusat Data dan Informasi		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan rencana kerja Tim Koordinasi SPBE	Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>		
	C	Rencana dan Anggaran berbasis Arsitektur SPBE						
		-	Penerapan kegiatan SPBE didalam RKA/L untuk setiap unit kerja terkait	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana		<input checked="" type="checkbox"/>		
	D	Penguatan Kebijakan SPBE Kementerian						
		-	Revisi Kepmen No. 24 tahun 2022 tentang Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana & Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan pedoman manajemen aset TIK	Biro Umum & Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Revisi Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2021 tentang Penerapan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas	Tim Koordinasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan surat edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembangunan Aplikasi Dan Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Kebutuhan kebijakan turunan yang mengatur penerapan Sistem Penghubung Layanan (Pedoman SPLP)			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Koordinasi terkait hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pembangunan Aplikasi SPBE	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE	Inspektorat Utama		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Revisi pedoman Manajemen Data pada Kementerian PPN/Bappenas	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Revisi pedoman Manajemen Pengetahuan Kementerian PPN/Bappenas	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Penyusunan pedoman Audit TIK	Inspektorat Utama		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Menyusun kebijakan teknis dan SOP Pengelolaan Keamanan Informasi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Menyusun kebijakan teknis penanganan Insiden Keamanan Informasi			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Menyusun kebijakan teknis dan SOP manajemen Data Center				<input checked="" type="checkbox"/>	

		-	Menyusun Kebijakan Teknis pengelolaan Jaringan Intra Kementerian			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Revisi Pedoman Manajemen Layanan Kementerian PPN/Bappenas				<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Penyusunan Kebijakan Manajemen Perubahan	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana		<input checked="" type="checkbox"/>		
2 Manajemen								
	A	Penerapan Manajemen Risiko SPBE						
		-	Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE	Inspektorat Utama		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penetapan konteks risiko SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan analisis Risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan serta level risiko SPBE.			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan evaluasi Risiko SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan rencana penanganan Risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara periodik dan insidental.			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE.			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Kementerian PPN/Bappenas			<input checked="" type="checkbox"/>		
	B	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi						
		-	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Pelaksanaan program kerja SPBE: menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan standar teknis dan SOP Keamanan SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan supervisi keamanan SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>		

	C	Penerapan Manajemen Data					
		-	Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Pusat	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Pengumpulan data induk oleh Kementerian PPN/Bappenas			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Pemeriksaan data induk dan data referensi			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Penyebarluasan data induk dan data referensi oleh Kementerian PPN/Bappenas			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Pembaharuan data induk dan data referensi			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Penyimpanan data pada Pusat Data Nasional			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Perencanaan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas dan jadwal pemutakhiran data			<input checked="" type="checkbox"/>	
	D	Penyelenggaraan Manajemen Aset TIK SPBE Kementerian					
		-	Pengesahan SOP Manajemen Aset TIK	Biro Umum & Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Menginventarisasi aset SPBE (data, informasi dan infrastruktur) Kementerian PPN/Bappenas			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK Kementerian PPN/Bappenas			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK Kementerian PPN/Bappenas			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK Kementerian PPN/Bappenas			<input checked="" type="checkbox"/>	
	E	Penerapan Manajemen Kompetensi SDM					
		-	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap SDM SPBE di Kementerian PPN/Bappenas	Biro Sumber Daya Manusia		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Peta jabatan Kementerian PPN/Bappenas			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Rencana atau pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM SPBE Kementerian PPN/Bappenas			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM SPBE Kementerian PPN/Bappenas			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas domain SPBE (manajemen SDM)			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Pembentukan tim dan penyusunan Dokumen HDCP				
		-	Penyempurnaan dokumen HDCP sesuai dengan hasil revidi				
	F	Penerapan Manajemen Pengetahuan					
		-	Penyusunan dokumen perencanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Kementerian PPN/Bappenas	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Pelaksanaan program kerja manajemen pengetahuan			<input checked="" type="checkbox"/>	

		-	Membangun sistem aplikasi manajemen pengetahuan			<input checked="" type="checkbox"/>		
	G	Penerapan Manajemen Layanan SPBE Kementerian						
		-	Pemanfaatan Portal Pusat Layanan	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana & Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>		
	H	Penerapan Manajemen Perubahan SPBE Kementerian						
		-	Penyusunan Log Manajemen Perubahan pada unit kerja Pusat data dan informasi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan SOP manajemen perubahan SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>		
3 Layanan								
	A	Portal Pelayanan Publik Kementerian yang terintegrasi						
		-	Pelaksanaan sosialisasi SRIKANDI dan penerapan SRIKANDI di Kementerian PPN/Bappenas	Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Pengintegrasian aplikasi SIRENA dengan aplikasi lain	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana		<input checked="" type="checkbox"/>		
	B	Portal Pelayanan Administrasi Kementerian yang terintegrasi						
		-	Pengintegrasian Sistranas dengan aplikasi e-kinerja.	Biro Sumber Daya Manusia		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Pengintegrasian SISTRANAS dengan SIASN (BKN)			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Kegiatan reviu dan evaluasi terhadap pemanfaatan aplikasi e-performance melalui kuesioner kepada stakeholder terkait	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana		<input checked="" type="checkbox"/>		
	C	Layanan JDIH						
		-	Pengembangan website JDIH dari Versi 4.1 ke 4.2	Biro Hukum		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Rapat koordinasi dengan BPHN selaku pembina JDIHN			<input checked="" type="checkbox"/>		
	D	Layanan Pengelolaan BMN						
		-	Penyusunan SOP Pengelolaan BMN secara keseluruhan	Biro Umum		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyusunan dokumentasi pengembangan aplikasi SILAT BMN berdasarkan SE Nomor. 2 Tahun 2022			<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Pengembangan aplikasi SILAT BMN (Integrasi data master pegawai Bappenas melalui SITRANAS dan integrasi SSO Bappenas)			<input checked="" type="checkbox"/>		
	E	Layanan Pengaduan Publik						
		-	Penyusunan SOP internal terkait pengelolaan Aplikasi LAPOR (Layanan Pengaduan Publik)	Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan		<input checked="" type="checkbox"/>		
		-	Penyelesaian Draft SOP pengelolaan Aplikasi LAPOR (Layanan Pengaduan Publik) dan proses legalisasi			<input checked="" type="checkbox"/>		

	F	Layanan Publik Sektoral					
		-	Pengembangan modul status peserta pada aplikasi Simdiklat (layanan publik sektoral)	Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana		<input checked="" type="checkbox"/>	
	G	Layanan Analitika Data					
		-	Pengembangan Layanan Analitika Data	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Aplikasi						
	A	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Kementerian					
		-	Melakukan koordinasi dengan Kominfo dan PANRB terkait Koordinasi akses API untuk di integrasikan ke aplikasi lain	Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Melakukan reviu dan evaluasi terkait pemanfaatan aplikasi SRIKANDI			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Pengembangan aplikasi SIMOU dan SITELUR	Biro Hukum		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Bekerjasama dengan LAN untuk mengintegrasikan API dengan aplikasi ASN	Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Pelaksanaan kegiatan reviu dan evaluasi SAKIP	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Pengembangan aplikasi SILAT BMN	Biro Umum		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Penyelesaian versi baru e-Performance	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Integrasi dalam aplikasi terkait service e-mail.	Inspektorat Utama		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	SPL Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas Service Bus) yang telah terintegrasi dengan SPL instansi lain	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Data log yang merekam setiap aktivitas pertukaran data antar-instansi.			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Monitoring dan evaluasi SPL Kementerian PPN/ Bappenas dan hasil tindak lanjut.			<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian PPN/Bappenas.	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Melaksanakan rapat koordinasi tentang identifikasi failure sistem pada aplikasi SISTRANAS yang terintegrasi dengan aplikasi IDW	Biro Sumber Daya Manusia		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Perbaikan dan pengembangan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI bersama ANRI	Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan		<input checked="" type="checkbox"/>	
		-	Integrasi aplikasi SILAT BMN melalui API dari SAKTI - Kementerian Keuangan untuk data aset	Biro Umum		<input checked="" type="checkbox"/>	

5 Infrastruktur							
A	Teknologi Informasi dan Komunikasi						
	-	Menyediakan Layanan Infrastruktur TIK	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>		
	-	Menyediakan SDM Pelaksana teknis Data Center & Infrastruktur TIK			<input checked="" type="checkbox"/>		
	-	Melakukan layanan dukungan teknis jaringan internet dan rapat daring			<input checked="" type="checkbox"/>		
	-	Penyediaan Infrastruktur Analitika Data			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	-	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Data Center & Infrastruktur TIK			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6 Keamanan							
A	Pengelolaan Keamanan Informasi						
	-	Menyediakan Layanan Asesmen dan Pengujian Keamanan Aplikasi	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		<input checked="" type="checkbox"/>		
	-	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi			<input checked="" type="checkbox"/>		
	-	Menyediakan SDM Pelaksana teknis Keamanan Informasi			<input checked="" type="checkbox"/>		
7 Audit TIK							
A	Pelaksanaan Audit TIK						
	-	Pelaksanaan rapat koordinasi dengan BRIN untuk akses tools audit	Inspektorat		<input checked="" type="checkbox"/>		
	-	Penyusunan rencana audit yang tertuang di RKT dan Peta Rencana SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>		
	-	Pelaksanaan audit TIK internal Keamanan SPBE			<input checked="" type="checkbox"/>		
	-	Pelaksanaan training dan penentuan ruang lingkup pelaksanaan audit TIK internal			<input checked="" type="checkbox"/>		
	-	Pelaksanaan audit TIK internal Aplikasi dan Infrastruktur			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati